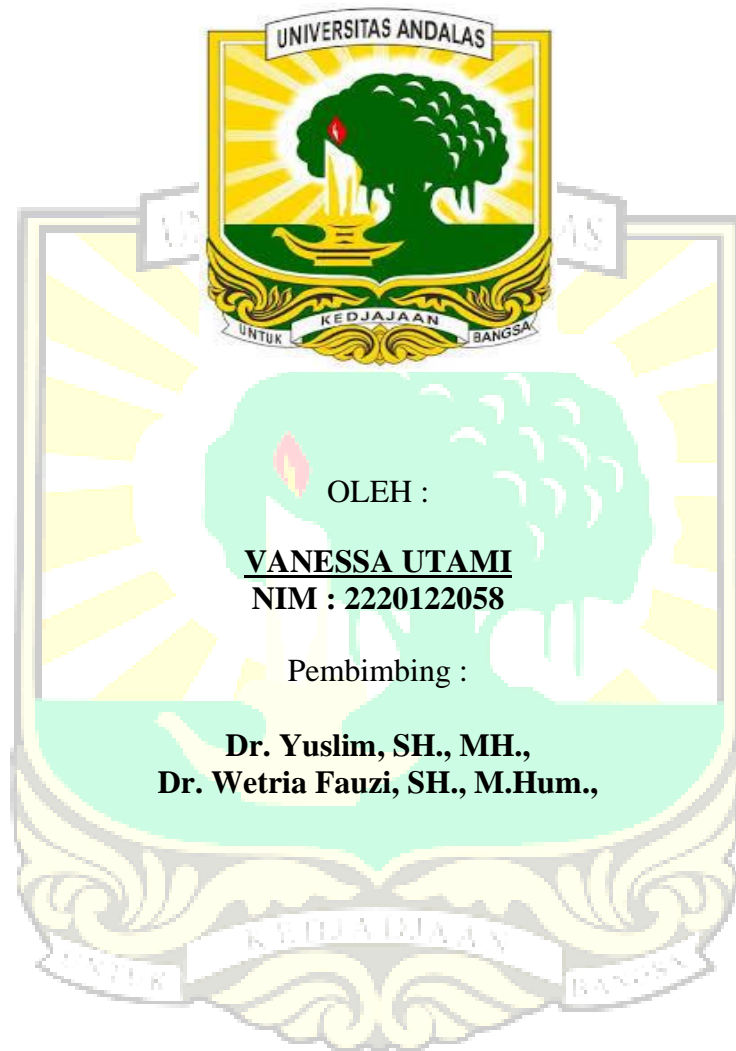


**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA  
PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA PADA SEBIDANG TANAH  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2019/PN.SDA)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan*



OLEH :

**VANESSA UTAMI**

**NIM : 2220122058**

Pembimbing :

**Dr. Yuslim, SH., MH.,  
Dr. Wetria Fauzi, SH., M.Hum.,**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS PEMBUATAN AKTA  
PERNYATAAN KEPEMILIKAN BERSAMA PADA SEBIDANG TANAH  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 191/PDT.G/2019/PN.SDA)**

Vanessa Utami, 2220122058, Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum,  
Universitas Andalas, 2025

**ABSTRAK**

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Akta otentik berfungsi sebagai alat bukti yang sah dalam hukum perdata sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Namun, dalam menjalankan kewenangannya, notaris wajib memastikan keabsahan materiil dari akta yang dibuat, khususnya terkait obyek hak atas harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda pada pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah, bagaimanakah pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah pada putusan pengadilan nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda, Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda pada pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta pernyataan kepemilikan bersama pada sebidang tanah dalam putusan pengadilan nomor 191/Pdt.G/2019/PN.Sda, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan ini menilai akta pernyataan kepemilikan bersama tersebut batal demi hukum karena dibuat tanpa persetujuan dari kedua belah pihak suami-istri yang merupakan pihak yang berkepentingan terkait harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU Perkawinan. Hakim menyatakan bahwa tindakan para tergugat maupun notaris selaku turut tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak penggugat, sehingga akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dari segi pertanggungjawaban notaris dinyatakan melakukan kelalaian dalam memastikan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan atas harta bersama. Akibatnya akta yang dibuat dinyatakan batal demi hukum dan notaris bertanggung jawab secara perdata, administratif, dan kode etik notaris sesuai ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Notaris, Akta Otentik, Harta Bersama, Perbuatan Melawan Hukum*

**NOTARY ACCOUNTABILITY FOR THE DRAFTING OF A DEED OF  
JOINT OWNERSHIP ON A PLOT OF LAND (Study Decision Number  
191/Pdt.G/2019/PN.Sda)**

**ABSTRACT**

Vanessa Utami (2220122058), Master of Notary, Andalas University, in 2025

*Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds are regulated in Law Number 30 of 2004 as amended by Law Number 2 of 2014 concerning the Position of Notary (UUJN). Authentic deeds function as valid evidence in civil law according to Article 1870 of the Civil Code (KUHPerdara). However, in exercising their authority, notaries are required to ensure the material validity of the deeds made, especially regarding the object of joint property rights as regulated in Articles 35 and 36 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The formulation of the problem in this study is how the judge's legal considerations in deciding case number 191/Pdt.G/2019/PN.Sda in making a deed of joint ownership statement on a plot of land, how is the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191/Pdt.G/2019/PN.Sda, The purpose of writing this thesis is to find out and analyze the judge's legal considerations in deciding case number 191/Pdt.G/2019/PN.Sda in making a deed of joint ownership statement on a plot of land, to find out and analyze the notary's responsibility for making a deed of joint ownership statement on a plot of land in court decision number 191/Pdt.G/2019/PN.Sda, the method used in this study is normative juridical. The study shows that the judge in this decision considered the deed of joint ownership statement to be null and void because it was made without the consent of both husband and wife who are interested parties related to joint property as regulated in Article 36 of the Marriage Law. The judge stated that the actions of the defendants and the notary as co-defendant were unlawful acts that were detrimental to the plaintiff, so that the deed did not have binding legal force. In terms of accountability, the notary was declared to have been negligent in ensuring the involvement of all interested parties in the joint property. As a result, the deed made was declared null and void and the notary was responsible civilly, administratively, and the notary's code of ethics in accordance with the provisions of the Notary Law.*

**Keywords: Notary Accountability, Authentic Deeds, Joint Property, Unlawful Acts**